

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Eggi Sudjana, 2008, *Republik tanpa KPK, Koruptor harus mati*, JP Books, surabaya.
- Elwi Danil, 2011 *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hj. Neng Sarmida, S.H. dkk, 2002, *Diktat hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana fakultas hukum, Universitas Andalas.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenanda Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineika Cipta, Jakarta.

Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suriadi, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi*, Gava Media, Jakarta.

Suyatno, 2005, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48b Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. JURNAL

Evie Hanavia “*kajian penerapan hukuman terhadap tersangka korupsi dana bantuan bencana alam berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*”, Vol.2, No.2, 2013.

Oksidelfa Yanto, “*Jurnal penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (death penalty to corruptors in a certain condition)*”

Elias Zadrack Leasa, “Eksistensi ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi pada masa pandemik covid-19”, Vol.6, No.1, 2020.

Danu Surya Putra, Rahnalemken Ginting, *analisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa kabupaten tapanuli selatan*, vol.7, No.2, 2018.

Naomi Sari Kristiana Harefa, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Vol.2, No.1, 2020.

D. WEBSITE INTERNET

Kompas.com, *Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung pada Wacana Hukuman Mati*
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/12515101/kasus-korupsi-di-tengah-pandemi-covid-19-yang-berujung-pada-wacana-hukuman?page=all>
diakses pada tanggal 5 November 2021, pukul 15.11 WIB.

M.Syukur, “Kasus Korupsi Rp 31 M, Ketua DPRD Bengkalis Divonis 1,5 Tahun Bui”
<https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui> diakses pada tanggal 5 November 2021, pukul 15.11 WIB.

Sigar aji poerana, Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19/> diakses pada tanggal 24 Mei 2021, pukul 22.05 WIB.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H., *Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal2 dalam Undnag-Undang Tipikor pada dakwaan subsidaritas atau alternatif*,
<https://media.neliti.com/media/publications/220789-peran-hakim-dalam-penerapan-pasal-2-unda.pdf> di akses pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 11.36 WIB.

<http://repository.uib.ac.id/527/7/S-1051061-chapter2.pdf> di unduh 24 Mei 2021, pukul 21.13 WIB.